



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS

**NO : 005 /BOD\_REA/ P/ II /2015, as amended September 2020**

**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERTANGGUNG JAWAB**  
RESPONSIBLE DEVELOPMENT POLICY

**R.E.A. HOLDINGS PLC**  
**PT REA KALTIM PLANTATIONS GROUP DAN ANAK PERUSAHAANNYA**  
PT REA KALTIM PLANTATIONS AND SUBSIDIARIES

References to REA and the group mean R.E.A. Holdings plc, PT REA Kaltim Plantations and all group companies.

Kebijakan ini berlaku untuk REA yang berarti meliputi R.E.A. Holdings Plc, PT REA Kaltim Plantations dan seluruh anak perusahaan.

REA is committed to undertaking all new developments in an environmentally and socially responsible manner. At present this is largely defined by the requirements of the Roundtable on Sustainable Palm Oil Principles and Criteria (**RSPO P&C 2018**), a standard which REA is committed to implementing throughout its oil palm operations.

REA berkomitmen untuk melakukan semua pembangunan baru dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Saat ini, hal ini sebagian besar ditentukan oleh persyaratan Prinsip dan Kriteria dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (**RSPO P&C 2018**), sebuah standar dimana REA berkomitmen untuk menerapkannya di seluruh operasi perkebunan.

For REA, responsible development means:

Untuk REA, pembangunan yang bertanggung jawab berarti:

**1. Compliance:** new plantations will be developed in accordance with all relevant local, national and international laws and regulations.

**1. Kepatuhan:** Perkebunan baru akan dikembangkan sesuai dengan semua peraturan yang terkait, baik lokal, nasional dan internasional.

**2. Conservation of biodiversity and ecosystem functions:**

**2. Konservasi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem:**

• **Environmental Impact Assessment (EIA):** an independent and participatory EIA will be conducted prior to any land development within the HGU area. Measures to mitigate negative environmental impacts will be incorporated into the planning and management of new developments.

• **Dampak Lingkungan (AMDAL):** Penilaian AMDAL secara independen dan partisipatif akan dilakukan sebelum pembukaan lahan di dalam kawasan HGU. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif akan dimasukkan ke dalam perencanaan dan pengelolaan perkebunan bar.

• **Maintenance of High Conservation Values (HCV):** an HCV assessment is conducted by an independent RSPO approved HCV assessor prior to any development within the HGU area. For areas in which RSPO New Planting Procedure was undertaken after 1 January 2015, this assessment is conducted by an independent HCV ALS (Assessor License Scheme) assessor. For areas where the RSPO New Planting Procedure was undertaken after 15 November 2018, this assessment is conducted by an independent HCV-HCS ALS (Assessor License Scheme) assessor. All areas identified as being HCV are designated as HCV management areas, are not developed, and are actively managed by REA's dedicated conservation team, in collaboration with government, NGOs and scientific institutions as required. REA and third parties are prohibited from clearing,

• **Menjaga Nilai Konservasi Tinggi:** Penilaian NKT dilakukan oleh penilai NKT independen yang disetujui RSPO sebelum pengembangan di seluruh kawasan HGU. Untuk area dimana Prosedur Penanaman Baru RSPO dilakukan setelah tanggal 1 Januari 2015, penilaian dilakukan oleh penilai NKT independen berlisensi ALS (Assessor License Scheme). Untuk area dimana Prosedur Penanaman Baru RSPO dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 penilaian SKT dilakukan oleh penilai NKT-SKT independen berlisensi ALS (Assessor License Scheme). Semua area yang diidentifikasi sebagai NKT ditetapkan sebagai kawasan pengelolaan NKT, tidak dikembangkan, dan secara aktif dikelola oleh tim konservasi khusus REA, bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan lembaga ilmiah sesuai kebutuhan. Baik REA maupun pihak ketiga dilarang membuka lahan,

cultivating or conducting illegal activities in the HCV management areas.

- **No development of steep areas:** land with a gradient of more than 20 degrees (36.4%) will not be planted with oil palm.
- **Protection of riparian zones:** buffers of natural vegetation will be maintained on both sides of natural watercourses. These buffer zones will be at least 50 metres wide on each side of the watercourse.

### 3. Minimisation of net Green House Gas (GHG) emissions:

- **Minimisation of net GHG emissions:** REA implements measures to avoid and mitigate GHG emissions in both its existing operations and new developments. GHG emissions are monitored and reported publicly on an annual basis.
- **Maintain High Carbon Stock (HCS) areas:** an HCS assessment (HCSA) is conducted by an independent assessor prior to any development within the HGU area where the RSPO New Plantings Procedure was undertaken after 1 January 2015. For areas where the RSPO New Planting Procedure was undertaken after 15 November 2018 this assessment is conducted by an independent HCV-HCS ALS (Assessor License Scheme) assessor. All HCS areas, including peatlands and forests are maintained and actively managed by REA's dedicated conservation team, in collaboration with government, NGOs and scientific institutions as required. REA and

mengelola, atau melakukan kegiatan ilegal di area pengelolaan NKT.

- **Tidak ada pengembangan pada kawasan curam:** tanah dengan kecuraman lebih dari 20 derajat (36,4%) tidak akan ditanami kelapa sawit.
- **Perlindungan zona tepi sungai:** penyangga vegetasi alami akan dipertahankan di kedua sisi sungai alami. Zona penyangga ini setidaknya memiliki lebar 50 meter di setiap sisi anak sungai.

### 3. Meminimalkan emisi bersih gas rumah kaca:

- **Meminimalkan emisi bersih GRK:** REA menerapkan langkah-langkah untuk menghindari dan mengurangi emisi GRK baik didalam operasi yang sudah ada maupun pengembangan baru. Emisi GRK dipantau dan dilaporkan secara publik setiap tahun.
- **Menjaga Area Dengan Stok Karbon Tinggi (SKT):** penilaian Stok Karbon Tinggi (SKT) dilakukan oleh penilai independen sebelum pengembangan apapun didalam kawasan HGU dimana Prosedur Penanaman Baru RSPO dilakukan setelah 1 Januari 2015. Untuk area dimana Prosedur Penanaman Baru RSPO dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 penilaian SKT dilakukan oleh penilai NKT-SKT independen berlisensi ALS (Assessor License Scheme). Semua area SKT, termasuk lahan gambut dan hutan, dipelihara dan dikelola secara aktif oleh tim konservasi khusus REA, bekerja sama dengan pemerintah, LSM dan lembaga ilmiah sesuai kebutuhan. REA dan pihak

third parties are prohibited from clearing, cultivating or conducting illegal activities in the HCS management areas.

- **Zero burning:** The use of fire for any land-clearing or other objectives within the REA HGU areas and areas from which third party FFB is sourced is strictly prohibited and this is actively monitored and enforced by REA.

- **No development on peat:** REA will not develop, plant in, or source third party FFB from areas that have been identified as peatland, regardless of depth.

- REA commits to using best management practices for its existing plantations on peat in consultation with independent experts and in accordance with accepted international industry certification standards.

- REA commits to peat restoration where applicable, in consultation with independent experts and in accordance with accepted international industry certification standards.

#### 4. Positive socio-economic impact:

- **Social Impact Assessment (SIA):** an independent and participatory SIA will be conducted prior to land development within the HGU area. Measures to mitigate potential negative social impacts and to create positive social impacts will be

ketiga dilarang membuka, membudidayakan atau melakukan aktivitas ilegal di wilayah pengelolaan SKT.

- **Tanpa pembakaran:** Penggunaan api untuk pembukaan lahan atau tujuan lain apa pun di dalam kawasan HGU REA dan di area yang merupakan sumber TBS dari pihak ketiga sangat dilarang dan ini secara aktif dipantau dan diterapkan oleh REA.

- **Tidak ada pengembangan area pada lahan gambut:** REA tidak akan mengembangkan, menanam, atau memperoleh sumber TBS dari pihak ketiga yang berasal dari area yang telah diidentifikasi sebagai lahan gambut, terlepas dari berapapun kedalamannya.

- REA berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen terbaik untuk perkebunan yang sudah ada di lahan gambut dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.

- REA berkomitmen untuk merestorasi gambut jika diperlukan, dengan berkonsultasi kepada para ahli independen dan sesuai dengan standar sertifikasi industri internasional yang diterima.

#### 4. Dampak sosial-ekonomi yang positif:

- **Penilaian Dampak Sosial (PDS):** Penilaian Dampak Sosial secara independen dan partisipatif akan dilakukan sebelum pembukaan lahan didalam kawasan HGU. Langkah-langkah untuk mengurangi potensi dampak negatif dan mengembangkan dampak sosial positif akan dimasukkan ke

incorporated into the planning and management of all new developments.

- **The Free, Prior & Informed Consent (FPIC) of local communities is obtained prior to development:** REA endeavours to ensure that everyone with legal, customary (or traditional) land tenure and/or ownership and/or access/use rights to the land is identified and fully understands the positive and negative implications of the proposed land development within the HGU area.
- **Respect for community land rights:** REA respects the right of local communities to give or withhold consent to oil palm cultivation on land to which they have legal, customary (or traditional) land tenure and/or ownership and/or access/use rights. REA engages in negotiations and provides fair compensation to those with such legitimate rights to the land. During these negotiations communities can choose to be represented by their own cultural, social and political institutional bodies.
- **Adequate access to information and transparency:** REA develops channels of communication and consultation in a transparent manner with communities from the time of planning the proposed oil palm development and for as long as the company operates in the area.
- **Regional assessment and resources:** REA is committed to conducting participative assessments with communities regarding the

dalam seluruh perencanaan dan pengelolaan perkebunan baru.

- **Persetujuan Bebas, Didahulukan & Diinformasikan (PADIATAPA) dari masyarakat setempat diperoleh sebelum pengembangan:** REA berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang dengan hak hukum, hak adat atau hak penggunaan lahan telah diidentifikasi dan sepenuhnya memahami implikasi positif dan negatif dari pengembangan lahan yang diusulkan didalam kawasan HGU.
- **Menghormati hak-hak pengguna lahan:** REA menghormati hak masyarakat lokal untuk memberikan persetujuan atau menolak untuk penanaman kelapa sawit diatas tanah mereka dimana mereka memiliki hak hukum, dan/atau hak adat (tradisional), dan/atau hak kepemilikan, dan/atau akses/penggunaan ke tanah. REA terlibat dalam negosiasi dan memberikan kompensasi yang adil kepada masyarakat yang memiliki hak sah atas tanah. Selama negosiasi ini masyarakat dapat memilih untuk diwakili oleh lembaga budaya, sosial dan politik mereka sendiri.
- **Transparansi dan akses yang memadai terhadap informasi:** REA mengembangkan saluran komunikasi dan konsultasi secara transparan dengan masyarakat mulai dari perencanaan pengembangan kelapa sawit yang diusulkan dan selama perusahaan beroperasi di wilayah tersebut.
- **Penilaian sumber daya regional:** REA berkomitmen untuk melakukan penilaian partisipatif bersama masyarakat mengenai

feasibility of the region and resources, the environment, protection of cultural sites and religious significance prior to any development taking place.

- **Smallholders:** REA is committed to support the inclusion of smallholders in their operations and develops smallholder schemes for the benefit of local communities in accordance with applicable Indonesian regulations.

**Scope:** this policy applies to the operations of any company within REA and its employees at all levels. This also includes all third party contractors operating within REA plantations, associated and independent smallholders, and suppliers.

**Implementation:** the commitments outlined in this policy are implemented through regulations and standard operating procedures for any company within REA. Senior management will review and revise this policy as necessary to meet the evolving expectations of its stakeholders and the sustainability standards to which it has committed.

PT REA Kaltim Plantations

President Director

**Luke M.D. Robinow**

14 September 2020

kelayakan wilayah dan sumber daya, lingkungan, perlindungan situs budaya dan signifikansi keagamaan sebelum pembangunan berlangsung.

- **Petani:** REA berkomitmen untuk mendukung keikutsertaan petani dalam operasi perusahaan dan mengembangkan petani plasma untuk kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan Indonesia yang berlaku.

**Lingkup:** Kebijakan ini berlaku untuk operasi perusahaan di seluruh perusahaan dibawah REA dan karyawan di semua tingkatan. Termasuk semua kontraktor pihak ketiga yang beroperasi di perkebunan REA, petani mandiri dan seluruh pemasok.

**Pelaksanaan:** komitmen yang diuraikan dalam kebijakan ini akan dilaksanakan melalui peraturan perusahaan dan berbagai prosedur operasi standar. Manajemen senior REA akan meninjau dan merevisi kebijakan jika diperlukan untuk memenuhi harapan yang berkembang dari para pemangku kepentingan dan standar keberlanjutan yang telah dilakukan.

R.E.A. Holdings plc

Managing Director

**Carol E. Gysin**

14 September 2020